

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN DI KABUPATEN TEGAL

Mustofa Sahri ¹, Darmawan ²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mustofasahri03@gmail.com

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, darmawan@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendalam untuk memahami upaya konkret yang dilakukan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan reduksi, penyajian, dan verifikasi data, serta validasi melalui observasi, triangulasi, dan pengecekan referensi. Informan penelitian terdiri dari pengurus OJK Kabupaten Tegal dan masyarakat Kabupaten Tegal. OJK Kabupaten Tegal terlibat aktif dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan, dan kolaborasi. Program seperti Edukasi Keuangan telah diterapkan, namun perlu peningkatan dalam program edukasi dan kampanye nasional untuk memastikan pemahaman literasi keuangan merata di wilayah kerja OJK Kabupaten Tegal yang sangat luas.

Kata Kunci : Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

ABSTRACT

This research emerged in response to a deep need to understand the concrete efforts being made to increase sharia financial literacy and inclusion in Tegal Regency. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews and documentation. Data analysis involves data reduction, presentation, and verification, as well as validation through observation, triangulation, and reference checking. The research informants consisted of Tegal Regency OJK administrators and the Tegal Regency community. OJK Tegal Regency is actively involved in strengthening sharia financial literacy and inclusion by applying principles such as planned and measurable, achievement-oriented, sustainable and collaborative. Programs such as Financial Education have been implemented, but there needs to be an increase in education programs and national campaigns to ensure that understanding of financial literacy is evenly distributed in the very large working area of OJK Tegal Regency.

Keywords : Sharia Financial Literacy and Inclusion

PENDAHULUAN

Di tengah kemajuan teknologi finansial dan perbankan, edukasi literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Literasi keuangan menjadi aspek yang sangat krusial bagi masyarakat agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi finansial dan produk finansial. Literasi keuangan juga menjadi jalan untuk keuangan yang lebih inklusif. Berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%. Persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 38,03%. Peningkatan tersebut menjadi indikasi tingkat inklusi keuangan yang makin tinggi. Inklusivitas keuangan yang tinggi pada suatu negara dapat menciptakan efisiensi ekonomi serta dapat mendukung stabilitas sistem keuangan nasional (Darmansyah, 2022).

Literasi keuangan merupakan sebuah kegiatan dan proses untuk menumbuhkan keterampilan, kemampuan, keyakinan, kesadaran, dan pengetahuan dalam mengelola keuangan yang memungkinkan masyarakat mampu menggunakan layanan jasa keuangan syariah maupun konvensional dalam upaya meningkatkan dan menyiapkan kondisi keuangan di masa mendatang (OJK, 2017). Komponen literasi keuangan yang paling krusial, menurut Arceo Gomez dan Villagomez (2017), adalah pengetahuan keuangan (yang berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan mengenai diversifikasi risiko, inflasi dan matematika), perilaku keuangan (seperti kesadaran akan situasi keuangan sendiri, kecenderungan untuk menabung, dan

tingkat tabungan), dan sikap terhadap keputusan keuangan (misalnya pentingnya tabungan untuk masa depan seseorang). Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi mengenai literasi keuangan dapat berkorelasi dengan inklusi keuangan, inklusi keuangan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi dan dapat berperan dalam stabilitas ekonomi yang terjadi di Indonesia (Frita, 2022). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76 Tahun 2016 Pasal 12, inklusi keuangan bertujuan agar meningkatnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, meningkatnya penyediaan produk dan layanan jasa keuangan, dan meningkatnya penggunaan serta kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Terlihat bahwa poin penting dari inklusi keuangan merupakan: (1) Memberikan kemudahan akses; (2) Tersedianya layanan terbaik; (3) Adanya kualitas terbaik dari sebuah produk keuangan.

Kabupaten Tegal menghadapi beragam tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Meskipun kecamatan ini memiliki potensi sumber daya yang beragam, seperti pertanian dan industri, namun ada sejumlah hambatan yang membatasi kemajuan ekonomi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah akses terhadap layanan keuangan yang memadai. Meskipun inklusi keuangan telah meningkat secara global, masih ada sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tegal yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan. Hal ini dapat menghambat potensi ekonomi masyarakat untuk berkembang dan mengakses sumber daya finansial yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan juga menjadi kendala serius. Banyak dari penduduk Kabupaten Tegal mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen keuangan pribadi, investasi, atau prinsip-prinsip keuangan yang sehat. Akibatnya, mereka mungkin rentan terhadap praktik keuangan yang merugikan atau tidak efektif, yang dapat menghambat kemajuan ekonomi mereka secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran Lembaga Keuangan Syariah menjadi semakin penting. Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi mitra strategis dalam upaya meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Kabupaten Tegal. Melalui program-program edukasi dan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu memberdayakan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mengakses layanan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi mereka.

KAJIAN LITERATUR

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, secara angsuran, maupun *Letter of Credit* (LC), serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Semisal, lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan mentasharrufkan

(menggunakan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya (Permana, 2020).

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi pembiayaan (Katman & Firawati, 2021).

Niswatin (2017) dalam bukunya mengatakan bahwa Keuangan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang pemahamannya mengenai kinerja manajemen dapat ditentukan oleh penciptaan profit yang menunjukkan kewajiban. Selama manajemen bertindak tidak melanggar aturan syariah, kemungkinan motif-motif ekonomi dilakukan juga merupakan hal wajar untuk dilakukan.

Lembaga keuangan Syariah, baik itu bank maupun non bank, merupakan penjaga prinsip-prinsip ekonomi Syariah dan bertindak sebagai wadah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam dunia finansial. Mereka menjalankan operasi mereka sesuai dengan pedoman Islam, yang mencakup berbagai aspek seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam distribusi kekayaan, kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, serta tanggung jawab sosial (Cahyanti, 2022).

Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Organization for economic cooperation and development atau OECD (2016), menyatakan bahwa literasi keuangan tidak hanya

pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan tapi juga kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan keuangan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan (financial well-being) individu dan masyarakat dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Literasi keuangan merupakan faktor yang fundamental untuk pertumbuhan ekonomi dan kestabilan keuangan bagi konsumen, penyedia jasa keuangan dan pemerintah. Literasi keuangan yang baik akan menimbulkan keputusan pembelian yang mengedepankan kualitas, dan meminimalisir keputusan yang salah yang akan diambil terhadap isu ekonomi dan keuangan. Literasi keuangan yang baik akan memberikan informasi yang memadai tentang produk, pemahaman resiko pada pelanggan, serta literasi keuangan yang baik pada Masyarakat akan meningkatkan pemasukan pajak bagi pemerintah untuk memaksimalkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik (Aribawa, 2016).

OECD (2018) menuliskan tentang indikator literasi keuangan sebagai berikut :

1. Pengetahuan umum keuangan
2. Perilaku keuangan
3. Sikap keuangan

Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan, baik dalam bentuk harga maupun non-harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Selain itu, dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia (2014), keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan

penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, dan penduduk di daerah terpencil.

World Bank (2016) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang dapat bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun hal usahanya seperti hal transaksi, pembayaran, tabungan, dan asuransi yang digunakan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Dikutip dari jurnal ilmiah milik Thorsten Beck, Asli Demircuc-Kunt, dan Patrick Honohan yang berjudul "Access to Financial Services: Measurement, Impact, and Policies", konsep inklusi keuangan saat ini telah berkembang menjadi beberapa tujuan seperti (1) Akses keuangan yang mudah untuk semua rumah tangga dan perusahaan, (2) Institusi yang sehat dengan berpedoman pada pengaturan dan pengawasan kehati-hatian, (3) Keberlanjutan keuangan dan kelembagaan lembaga keuangan, dan (4) Persaingan antar penyedia layanan untuk menghadirkan alternatif bagi pelanggan (Honohan, Beck, & Demircuc-Kunt, 2009).

OECD (2018) mengungkapkan bahwa inklusi keuangan memiliki tiga indikator sebagai berikut :

1. *Awareness*
2. Status kepemilikan
3. Lama kepemilikan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan

reduksi, penyajian, dan verifikasi data, serta validasi melalui observasi, triangulasi, dan pengecekan referensi. Informan penelitian terdiri dari pengurus OJK Kabupaten Tegal dan masyarakat Kabupaten Tegal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tegal merupakan berbagai lembaga yang kehadirannya adalah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dan badan usaha dalam bentuk produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Di Kabupaten Tegal sendiri terdapat banyak sekali pondok pesantren dan mayoritas masyarakatnya sangat agamis yang kemudian mengubah pola pikir masyarakat terkait penggunaan instrumen keuangan yang berbasis syariah. Kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah ini diharap menjadi pihak yang menjadi *game changer* untuk mengubah pola pikir masyarakat dan memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat ingin menggunakan berbagai produk dari lembaga ini. Kepala OJK mengatakan bahwa

“OJK akan terus menjaga konsistensi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengenali lembaga keuangan illegal, termasuk lembaga keuangan konvensional dan syariah, agar tidak semakin merugikan masyarakat sehingga akselerasi pemulihan ekonomi dapat tercapai”

Keberadaan OJK Tegal merupakan respon dari pemerintah dalam melihat berbagai sektor yang kemudian memiliki kontribusi terhadap pengawasan pembangunan ekonomi nasional. Masyarakat dan UMKM perlu difasilitasi dengan pemberian edukasi, lewat Otoritas Jasa Keuangan yang menawarkan perijinan lembaga keuangan sehingga masyarakat dapat mengakses lembaga tersebut.

Kemudahan yang diberikan berupa tidak prosedur administrasi yang yang mudah dipenuhi.

Literasi Keuangan Masyarakat Kabupaten Tegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Tegal hadir dengan tujuan utama untuk ikut serta dalam mengawasi lembaga keuangan, memberdayakan, dan mendidik masyarakat sekitar. OJK ini dibentuk di pusat Kabupaten Tegal, sebuah pilihan strategis yang bertujuan untuk mendekatkan lembaga kepada masyarakat dengan memastikan akses yang mudah dijangkau. Namun, lebih dari sekadar pengawasan, OJK Tegal memiliki aspirasi lebih luas, yaitu menjadi lembaga yang berperan aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kabupaten Tegal, terutama mengingat keberadaan banyak pondok pesantren di wilayah tersebut.

Kabupaten Tegal memiliki Masyarakat muslim yang besar dan sangat solid, melebihi Kota Tegal. Hal ini mendorong OJK Tegal untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren, tempat di mana edukasi pengelolaan keuangan syariah diberikan kepada para santri. Dengan pemahaman bahwa pondok pesantren memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter dan pemikiran masyarakat, OJK Tegal melihatnya sebagai potensi besar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Meskipun latar belakang Masyarakat Kabupaten Tegal ini muslim dan Pendidikan islamnya sangat kuat, al tersebut tidak secara otomatis menjamin tingginya literasi keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan keislaman saja tidak cukup untuk mencapai kesejahteraan keuangan, dan literasi keuangan syariah perlu ditekankan sebagai komponen yang sama pentingnya. Dari penelitian terhadap beberapa

informan, terungkap bahwa masih ada proses yang diperlukan untuk mengaplikasikan literasi keuangan syariah yang dimiliki, terutama dengan keterbatasan akses inklusi keuangan. Hal ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Tegal terkait dengan pemahaman dan akses terhadap keuangan syariah.

OJK Kabupaten Tegal sebagai lembaga pengawas dan edukasi diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kabupaten Tegal. Pendidikan dan pendekatan yang bersifat inklusif, terutama dalam kerjasama dengan pondok pesantren, menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memahami bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga implementasi praktis, OJK Tegal dapat berperan sebagai katalisator positif dalam membentuk masyarakat yang mampu mengelola keuangan secara syariah dan berdaya ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki penduduk dengan mayoritas umat muslim. Data jumlah penduduk muslim pada tahun 2024 sebanyak 1,69 juta jiwa (Pamungkas, 2024). Dengan jumlah penduduk muslim yang besar sebagai potensi, masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi di sektor keuangan syariah, antara lain masih rendahnya Tingkat literasi keuangan syariah di Masyarakat. Kepala OJK mengatakan bahwa Literasi keuangan syariah itu penting agar masyarakat dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya masyarakat juga tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya.

Untuk meningkatkan Tingkat literasi Masyarakat Kabupaten Tegal secara massif, OJK mengadakan Gelar

Edukasi Keuangan yang bertempat di Pendopo Amangkurat pada Bulan Januari kemarin. Dalam materi-materi yang diberikan, Wanita yang Bernama Fredica selalu menghimbau agar selalu waspada terhadap berbagai penawaran investasi ilegal yang seringkali menawarkan imbal hasil yang tinggi dan pinjaman *online illegal* yang memberikan kemudahan dalam pencairan dana. Selain itu, beliau juga mendorong Masyarakat agar dapat mempelajari lebih lanjut terkait produk-produk keuangan syariah dan mengelola keuangan secara bijak.

"Jadi, jangan sampai Bapak dan Ibu mendapat pembiayaan yang tidak benar dari pinjol-pinjol ilegal karena nanti bunganya akan merepotkan Bapak Ibu sendiri. Kami di sini juga ingin berterima kasih kepada Pak Sekda, dan bapak ibu lainnya yang luar biasa, sudah bersinergi disini. Kita ingin mendorong masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang cakap keuangan, memanfaatkan fasilitas, dan mendorong inklusi keuangan untuk bagaimana bisa mendukung usahanya. Saya doakan usahanya makin berkembang, makin sukses," tegasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yakni Bapak Amir Mahmud, juga mengapresiasi dengan Upaya OJK untuk senansiasa selalu memfasilitasi terselenggaranya kegiatan edukasi keuangan untuk Masyarakat di Kabupaten Tegal.

"Saya memandang ini adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem keuangan inklusi yang tangguh, sembari terus memperkuat edukasi atau informasi kepada pelaku UMKM kita tentang literasi keuangan. Kesenjangan pada inklusi dan literasi keuangan harus terus ditekan melalui edukasi ke masyarakat dan pelaku UMKM seperti yang kita selenggarakan hari ini. Minimal, dari sini kita bisa memahami risiko dan tidak mudah terjebak oleh praktik-praktik yang merugikan,

seperti terjebak pinjaman online ilegal dengan bunga melangit,” kata Amir.

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan menjadi angin segar untuk Masyarakat Kabupaten Tegal untuk lebih mendalami literasi keuangan dan menuju inklusi keuangan.

Dilanjutkan pada Upaya peningkatan literasi keuangan syariah di Kabupaten Tegal, penulis mendapati informan yang menjelaskan tentang peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan. Diturunkan oleh Kepala OJK bahwa

“Mas, Upaya untuk meningkatkan literasi setidaknya OJK dapat bersinergi dengan Lembaga keuangan, Masyarakat, dan pemerintah dalam mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, atau yang lainnya”

Dari beberapa pemaparan diatas, penyusun berkesimpulan upaya atau peran untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Kabupaten Tegal memang dilaksanakan secara terprogram, OJK Tegal yang menjadi garda terdepan mampu mengatur upaya itu terus berjalan guna meningkatkan literasi keuangan syariah. Karena dengan meningkatnya literasi keuangan syariah tersebut maka dampak pada aspek *knowledge*, agama dan ekonomi bisa menjadi jawaban atas semua kendala dilapangan dan kemaslahatan umat bisa diterima oleh Masyarakat.

Inklusi Keuangan Kabupaten Tegal

Tantangan utama dalam inklusi keuangan syariah terletak pada keterbatasan jaringan kantor di sektor keuangan syariah di wilayah Kabupaten Tegal. Berdasarkan pengamatan, dari 77 lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah tersebut, hanya 3 unit BPR yang telah menerapkan prinsip syariah. Sementara itu, Bank Umum yang menerapkan prinsip syariah hanya mencakup 5 lembaga perbankan, dan jumlah pegadaian

serta asuransi syariah hanya terdiri dari 2 lembaga. Kondisi ini mencerminkan perlunya upaya keras untuk memperkenalkan produk keuangan syariah guna meningkatkan jumlah lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tegal. Saat ini, pertumbuhan lembaga keuangan syariah masih terbatas, dan melalui perkenalan produk-produk keuangan syariah, diharapkan dapat merangsang pertumbuhan lebih lanjut. Hal ini tidak hanya akan memperluas akses Masyarakat terhadap keuangan syariah, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya memperkenalkan produk keuangan syariah sebagai langkah strategis dalam menghadapi keterbatasan jaringan kantor dapat membantu menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat dan inklusif. Dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, diharapkan pula dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal. Hadirnya OJK Tegal di tengah-tengah masyarakat menjadi skema nyata dari identitas pengaturan keuangan inklusif yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan usaha-usaha produktif di Masyarakat. Ujuan yang dimaksud adalah sebagai mana yang ditulis oleh Nusron Wahid (2014), yaitu :

1. Menjadikan keuangan inklusif sebagai satu usaha untuk membuka eksklusivitas lembaga keuangan yang pada umumnya hanya memberi permodalan kepada pihak-pihak yang dianggap *bankable*.
2. Menetapkan niat dalam menjalankan keuangan inklusif, yaitu niat kesediaan untuk memasukkan pihak non bankable yang selama ini dieksklusi atau

dipinggirkan dari lembaga keuangan untuk dikategorikan kembali sebagai pihak yang layak dan patut mendapatkan berbagai jasa layanan keuangan.

Layanan keuangan syariah sudah ditawarkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah kepada masyarakat Kabupaten Tegal, namun belum semua masyarakat mengetahui berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal tersebut. Hadirnya OJK Kabupaten Tegal di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tegal diharapkan mampu menghidupkan siklus ekonomi syariah Masyarakat.

Konsep Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Kabupaten Tegal

Menurut Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami. Jadi literasi keuangan syariah diartikan sebagai kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang sesuai dengan kaidah syariah. OJK mengatakan hal penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara pintar, agar rendahnya pengetahuan industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak akan mudah tertipu.

Terdapat beberapa prinsip peningkatan literasi keuangan yang direncanakan oleh OJK Kabupaten Tegal, yaitu :

1. Terencana dan terukur

Kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas dan kebijakan pelaku usaha jasa keuangan serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan literasi keuangan

syariah.

2. Berorientasi pada pencapaian

Kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan literasi keuangan syariah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

3. Berkelanjutan

Kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, pelaku usaha jasa keuangan perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan syariah.

4. Kolaborasi

Kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama. Keempat prinsip tersebut diimplementasikan oleh OJK Tegal dalam program edukasi.

Hambatan Program Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Tegal

Salah satu tantangan utama dalam literasi dan inklusi keuangan syariah adalah kesenjangan yang terjadi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan. Berdasarkan survei, literasi keuangan secara konsisten menunjukkan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa konsumen mungkin memiliki akses, kapasitas, dan permintaan terhadap produk keuangan syariah, namun kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang memadai untuk mengoptimalkan penggunaan produk tersebut guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal telah merespons hal ini dengan menggelar

program-program literasi keuangan syariah secara rutin, seringkali melalui kerja sama dengan asosiasi industri dalam berbagai seminar dan *workshop* sosialisasi.

Program-program ini, yang biayanya ditanggung bersama oleh OJK dan mitra kerjasama, sering kali berfokus pada calon konsumen dan berusaha menjangkau khalayak yang lebih luas. Namun, keefektifan dari seminar sebagai sarana meningkatkan literasi keuangan masih memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif. OJK Tegal tampaknya berkomitmen untuk terus mengarahkan program-program literasi keuangan mereka sesuai dengan tujuan, namun perlu ditekankan pentingnya evaluasi yang sistematis dan menyeluruh. Meskipun OJK Tegal telah menghadirkan berbagai program literasi keuangan, terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi keefektifan setiap program secara menyeluruh. Evaluasi ini perlu melibatkan analisis komprehensif terkait hasil program, partisipasi masyarakat, serta dampak nyata yang dihasilkan. Hal ini memungkinkan OJK untuk mengarahkan sumber daya mereka ke program-program literasi keuangan yang paling efisien dan efektif.

OJK Tegal juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program literasi keuangan dapat mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti masyarakat pedesaan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Inklusif (SNLKI) 2021–2025. Mengevaluasi dampak dan jangkauan program-program literasi keuangan dapat membantu OJK Tegal mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat memperkuat upaya mereka dan memberikan manfaat maksimal.

Alam konteks konten dan

penyampaian edukasi keuangan syariah, evaluasi juga sangat penting. Mayoritas program literasi keuangan di Tegal cenderung berfokus pada pengetahuan tentang produk keuangan syariah. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah program sebaiknya disampaikan secara terpisah atau digabungkan dengan pemasaran produk. Pendekatan terpisah memudahkan pelacakan program literasi dan inklusi, tetapi ada pertanyaan apakah ini adalah cara terbaik untuk mengedukasi konsumen mengenai keputusan keuangan konkret. Sementara itu, pendekatan yang didorong oleh produk dapat memberikan panduan lebih spesifik, namun mungkin kurang memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen. Sebagai langkah lanjutan, OJK Tegal perlu mempertimbangkan evaluasi menyeluruh yang mencakup semua aspek program literasi keuangan. Hal ini mencakup analisis dampak, partisipasi, efektivitas konten, dan evaluasi terhadap cara penyampaian program. Dengan pendekatan yang komprehensif, OJK Tegal dapat memastikan bahwa upaya mereka dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat mencapai hasil yang optimal, terutama dalam mencapai kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 kerangka berfikir.
(Sumber : Diolah penulis, 2024)

PENUTUP

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan yang tertulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menuliskan kesimpulan berupa:

1. Konsep peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di OJK Tegal merupakan konsep yang melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai sumber layanan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Kemudian selain itu, OJK Tegal menerapkan empat prinsip penting dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, antara lain terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan serta kolaborasi.
2. Kehadiran OJK Tegal dirasakan oleh masyarakat sangat berdampak positif. OJK Tegal dapat menjawab keresahan masyarakat selama ini

Secara keseluruhan program edukasi yang dilakukan oleh OJK Tegal sudah baik. Namun menurut pengamatan penulis, pelaksanaan program edukasi dan kampanye nasional perlu ditingkatkan lagi dari mulai program edukasi dan daerah jangkauan serta masyarakat sasaran edukasi sehingga pemahaman akan

tingkat literasi keuangan dapat menyeluruh dan merata di segala aspek, dimana wilayah kerja OJK Tegal sangat luas.

REFERENSI

Arceo-gómez, E. O. (2017). International Review of Economics Education Financial literacy among Mexican high school teenagers. *International Review of Economics Education*.

Aribawa, D. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*.

Cahyanti, I. S. (2022). Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. *SHIDQIA NUSANTARA :Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1-11.

Darmansyah. (2022, November 22). *Otoritas Jasa Keuangan*. Diambil kembali dari Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>

Development, [. O.-o. (2016).

OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies. Paris: Organization for Economic Cooperation Development.

Development, [. O.-o. (2018). *OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion*. Paris: OECD.

Frita, N. H. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Infrastruktur Nasional

- Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Program SDGs. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 155 - 182.
- Honohan, P., Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2009). Access to Financial Services: Measurement, Impact, and Policy. *World Bank Research Observ.*
- Indonesia, B. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM*. Bank Indonesia.
- Katman, M., & Firawati. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat. *At Tawazun : Jurnal Ekonomi Islam*, 26-32.
- Keuangan, O. J. (2017, Desember 27). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan : [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-\(Revisit-2017\)-/SNLKI%2520\(Revisit%25202017\)-new.pdf&ved=2ahUKEwi1qlyxjv](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI%2520(Revisit%25202017)-new.pdf&ved=2ahUKEwi1qlyxjv)
- Niswatin. (2017). *Kinerja Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Zahr Publishing.
- Pamungkas, S. S. (2024, Mei 4). *5 Kecamatan dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Kabupaten Tegal 2024, Mana Saja?* . Retrieved from Pantura Post : <https://www.panturapost.com/tegal/2074514368/5-kecamatan-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-kabupaten-tegal-2024-mana-saja>
- Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah . *TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 17-29.
- Wahid, N. (2014). *Keuangan inklusif : Membongkar hegemoni keuangan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Yanti, W. E. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.